

Peran Civic Resilience Kaum Disabilitas Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan di Bangka Belitung

Muhamad Hijran¹ Dini Oktariani²

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Origin Universitas Bangka Belitung,^{1,2}

Email: muhamad-hijran@ubb.ac.id¹ dini-oktariani@ubb.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *civic resilience* (ketahanan kewarganegaraan) pada kaum disabilitas dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Civic resilience* dipahami sebagai kemampuan warga negara untuk menghadapi tantangan sosial, politik, dan budaya, serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berbangsa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka, penelitian ini mengkaji teori kewarganegaraan inklusif, ketahanan sosial, dan pendidikan karakter sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan *civic resilience* pada kaum disabilitas di Bangka Belitung masih menghadapi berbagai hambatan struktural, seperti terbatasnya akses pendidikan, rendahnya partisipasi publik, dan adanya stereotip sosial yang membatasi ruang gerak mereka. Pendidikan Kewarganegaraan memainkan peran yang sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran kritis, empati sosial, serta keterampilan advokasi bagi warga disabilitas, agar mereka dapat berpartisipasi secara setara dalam kehidupan masyarakat. Kesimpulannya, *civic resilience* pada kaum disabilitas dapat diperkuat melalui kurikulum kewarganegaraan yang inklusif dan praktik pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta partisipasi demokratis.

Kata Kunci: *Civic Resilience*, Pendidikan Kewarganegaraan, Kaum Disabilitas

Abstract

This study aims to analyze the concept of civic resilience among people with disabilities from the perspective of Citizenship Education in the Bangka Belitung Islands Province. Civic resilience is understood as the ability of citizens to overcome social, political, and cultural challenges and actively participate in the nation-building process. Using a qualitative approach based on literature review, this research examines the theories of inclusive citizenship, social resilience, and character education as analytical frameworks. The findings indicate that the development of civic resilience among people with disabilities in Bangka Belitung faces various structural barriers, such as limited access to education, low public participation, and social stereotypes that restrict their opportunities for self-actualization. Citizenship Education plays a crucial role in fostering critical awareness, social empathy, and advocacy skills among people with disabilities, enabling them to participate equally in society. In conclusion, civic resilience among people with disabilities can be strengthened through an inclusive citizenship curriculum and educational practices based on values of humanity, justice, and democratic participation.

Keywords: *Civic Resilience, Citizenship Education, People With Disabilities*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam era demokrasi yang semakin kompleks dan dinamis, pendidikan kewarganegaraan memegang peranan sentral dalam menyiapkan warga negara yang aktif, kritis, dan adaptif terhadap perubahan sosial-politik. Tantangan modern seperti polarisasi sosial, disinformasi, dan ketidaksetaraan menuntut warganegara tidak hanya memiliki pengetahuan hukum atau politik, tapi juga ketahanan sipil (*civic resilience*) kemampuan untuk tetap berpartisipasi bermakna meski menghadapi hambatan struktural atau perubahan tak terduga. Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) merupakan sarana strategis dalam membangun karakter warga negara yang demokratis, partisipatif, dan berkeadilan sosial. Implementasi Pendidikan

Kewarganegaraan yang efektif juga dapat memperkuat literasi manusia, yang esensial untuk membentuk warga negara yang mampu menghadapi tantangan era disrupsi dan membangun ketahanan pribadi (Sari et al., 2020). Dalam konteks Indonesia, isu inklusivitas kewargaan menjadi penting karena masih banyak kelompok masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, yang belum menikmati hak-hak kewargaan secara setara. Hal ini mencakup akses terhadap pendidikan yang relevan, kesempatan partisipasi publik yang bermakna, serta penghapusan stereotip sosial yang menghambat aktualisasi diri penyandang disabilitas (Ginting et al., 2021).

Dalam konteks Bangka Belitung, situasi ini tampak pada terbatasnya akses kaum disabilitas terhadap ruang publik, kesempatan kerja yang inklusif, serta keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat komunitas maupun pemerintahan. Akibatnya pendidikan kewarganegaraan yang seharusnya berperan sebagai wahana pembentukan warga negara kritis dan partisipatif, justru belum sepenuhnya mampu menjembatani kesenjangan tersebut. Padahal, pendidikan karakter dalam kurikulum kewarganegaraan sangat dibutuhkan untuk membekali siswa dengan sikap dan pemikiran yang tepat, termasuk bagi penyandang disabilitas (Herawati et al., 2022). Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai kewargaan yang diinternalisasikan melalui proses pembelajaran sering kali masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya menyentuh aspek keadilan sosial dan keberagaman kemampuan. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan yang secara eksplisit mengintegrasikan perspektif disabilitas, guna mendorong pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara tanpa terkecuali (Agum Murtaib et al., 2024). Kondisi ini memperlihatkan bahwa paradigma pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, termasuk di Bangka Belitung, masih memerlukan pergeseran dari pendekatan yang berorientasi pada *civic knowledge* menuju pendekatan yang menekankan *civic competence* dan *civic resilience*. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan keterampilan praktis dan kapasitas adaptif individu untuk menghadapi dinamika sosial, serta membangun ketahanan diri dan kolektif (Lestari et al., 2025).

Dalam konteks inilah, konsep *civic resilience* menjadi penting untuk dikaji. Konsep ini memperluas pemahaman tentang kemampuan warga negara, khususnya kaum disabilitas, untuk bertahan dan berkembang di tengah berbagai tantangan, serta mengaplikasikan nilai-nilai hidup yang terwujud dalam perilaku sehari-hari seperti menerima keberagaman bangsa (Ginting et al., 2021). Dalam kerangka ini, *civic resilience* tidak hanya dimaknai sebagai ketahanan dalam menghadapi tekanan sosial atau ekonomi, tetapi juga sebagai kemampuan untuk menjaga integritas moral dan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan di tengah ketidaksetaraan sosial yang dialami. Bagi kaum disabilitas, hal ini berarti memiliki kapasitas untuk terus berpartisipasi aktif, menegosiasikan ruang sosialnya, serta memperjuangkan hak-hak kewargaan meskipun berada dalam kondisi yang penuh keterbatasan struktural. Melalui pendidikan kewarganegaraan, individu dapat mengembangkan kebiasaan moral dan etika yang baik, serta menjadi cerdas dan berakhlak mulia (Mahdiah et al., 2023).

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, isu ini memiliki relevansi khusus karena wilayah ini memiliki karakter sosial yang majemuk dengan persebaran geografis yang menantang. Keterbatasan akses pendidikan inklusif di daerah kepulauan menambah kompleksitas dalam upaya membangun ketahanan sipil bagi kaum disabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan dapat dioptimalkan untuk membentuk karakter Pancasila yang kuat dan membangun *civic resilience* kaum disabilitas di Bangka Belitung, sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk mencetak warga negara yang cerdas dan berakhlak mulia (Mazid et al., 2024).

Dengan mengintegrasikan isu disabilitas ke dalam praktik pembelajaran dan kegiatan kewargaan, PKn dapat mendorong terbentuknya ekosistem pendidikan yang lebih empatik, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya memperkuat kapasitas individu disabilitas sebagai warga negara yang berdaya, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial Bangka Belitung sebagai miniatur Indonesia yang majemuk dan berkeadilan. Kajian literatur ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana konsep *civic resilience* diterapkan dalam konteks pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, dengan fokus pada kaum disabilitas di Bangka Belitung. Tujuan akhirnya adalah merumuskan model konseptual tentang penguatan ketahanan sipil melalui PKn yang berorientasi pada keadilan sosial dan inklusi. Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan PKn, tetapi juga menawarkan perspektif praktis untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan berkeadilan bagi seluruh warga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi literatur kualitatif, dengan menganalisis secara komprehensif berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan kebijakan pemerintah yang relevan dengan Pendidikan Kewarganegaraan, isu disabilitas, dan konsep ketahanan sipil. Pendekatan ini memungkinkan peneliti membangun argumentasi konseptual yang kuat berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang kredibel dan terkini. Metode ini dipilih untuk memastikan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial yang diteliti, yang tidak hanya melibatkan sintesis informasi tetapi juga interpretasi kritis terhadap data yang ada (Simarmata et al., 2024). Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian pendidikan kewarganegaraan yang berperspektif inklusif, sekaligus menawarkan implikasi praktis bagi penguatan kebijakan dan program pendidikan di daerah, khususnya dalam upaya mewujudkan masyarakat Bangka Belitung yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan sosial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tantangan Struktural dalam Membangun Civic Resilience Kaum Disabilitas di Bangka Belitung

Pembangunan *civic resilience* bagi kaum disabilitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi berbagai tantangan struktural yang kompleks. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan inklusi, hambatan-hambatan tersebut menghambat partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial dan politik. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan aksesibilitas geografis, infrastruktur yang tidak memadai, serta birokrasi yang rumit dalam mengakses program-program kebijakan sosial (Mahayani, 2025). Oleh karena itu, peran pemerintah dan masyarakat sangat krusial dalam memperkuat ketahanan sipil penyandang disabilitas di Bangka Belitung. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan kebijakan yang lebih inklusif dengan memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang sama terhadap fasilitas publik, layanan sosial, dan pendidikan. Banyak fasilitas publik, termasuk gedung sekolah dan kantor pemerintahan, belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan dan publik lainnya, yang pada gilirannya membatasi kesempatan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat (Kurniawan & Nurhasanah, 2020). Dengan demikian, aksesibilitas menjadi krusial untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas, terutama dalam memanfaatkan layanan publik.

Selain itu, kurangnya pelatihan dan pemahaman di kalangan pendidik mengenai pendidikan inklusif menjadi hambatan signifikan. Banyak guru belum memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk mengajar siswa dengan kebutuhan khusus. Akibatnya, kualitas pendidikan bagi penyandang disabilitas sering kali tidak optimal, yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan sosial dan politik (Rahadian, 2023). Oleh karena itu, penguatan kurikulum yang lebih responsif terhadap keberagaman kebutuhan peserta didik sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberi mereka kesempatan yang lebih besar untuk berkontribusi secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Stigma sosial terhadap penyandang disabilitas juga masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Pandangan negatif dan stereotip terhadap mereka sering kali mengarah pada diskriminasi dan marginalisasi. Hal ini menghambat mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memperkuat ketahanan sipil mereka (Audica, 2025). Untuk mengatasi masalah stigma sosial ini, dibutuhkan upaya kolektif dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan yang berbasis pada nilai-nilai inklusif dan penghargaan terhadap keberagaman dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam merubah persepsi negatif tentang penyandang disabilitas. Dengan penanaman nilai-nilai tersebut sejak dini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih menerima dan mendukung peran aktif penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.

Selain itu, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic philanthropy* dapat menjadi strategi efektif dalam membangun *civic resilience* bagi penyandang disabilitas. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran sosial, mengurangi stigma, dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam kehidupan sosial dan politik (Agil Nanggala, Karim Suryadi, 2024). Dengan demikian, meskipun terdapat berbagai tantangan struktural, upaya untuk membangun *civic resilience* bagi penyandang disabilitas di Bangka Belitung dapat dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas, pelatihan bagi pendidik, pengurangan stigma sosial, dan penerapan pendidikan kewarganegaraan yang inklusif. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara setara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Kaum Disabilitas

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran dan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis pada nilai-nilai Pancasila, PKn dapat menjadi alat efektif untuk mengurangi stigma sosial dan membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk berkontribusi secara setara dalam masyarakat. Implementasi PKn yang efektif juga memerlukan peran aktif guru sebagai fasilitator pembelajaran kritis. Guru yang memahami kebutuhan khusus penyandang disabilitas dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung perkembangan partisipasi mereka dalam kegiatan sosial dan politik (Meyrdania, Amelia Dwi Putri, 2025). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan yang berbasis pada pemahaman hak-hak dasar warga negara dapat meningkatkan kesadaran penyandang disabilitas tentang hak mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Hal ini tidak hanya terkait dengan hak politik, tetapi juga hak untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik lainnya secara setara. Sebagai contoh, dalam konteks pendidikan, kurikulum PKn yang inklusif dapat mengajarkan pentingnya penghargaan terhadap perbedaan, serta memberi pemahaman tentang bagaimana penyandang disabilitas dapat berperan dalam memperkuat demokrasi dan kehidupan sosial-politik negara.

Kemudian, pengajaran yang berfokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas juga membantu mereka untuk membangun keterampilan advokasi dan kemampuan untuk menyuarakan kebutuhan mereka. Melalui pendidikan ini, penyandang disabilitas tidak hanya dilatih untuk memahami hak-hak mereka, tetapi juga diberikan keterampilan untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan hak-hak tersebut dalam berbagai forum sosial dan politik. Sebagai hasilnya, PKn berperan sebagai sarana yang memberdayakan mereka untuk menjadi warga negara yang aktif dan setara, serta untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan yang mempengaruhi hidup mereka. Selain itu, penyediaan materi ajar yang ramah disabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses informasi dengan cara yang sesuai dengan kemampuan mereka. Penggunaan teknologi assistive, seperti perangkat lunak pembaca layar atau video dengan teks, dapat membantu siswa disabilitas dalam memahami materi ajar. Selain itu, materi pembelajaran yang mencakup topik-topik inklusivitas, keadilan sosial, dan hak asasi manusia sangat penting untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran mereka sebagai warga negara yang setara. Peningkatan kesadaran masyarakat juga tidak kalah penting, karena tanpa dukungan sosial yang kuat, partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan tetap terbatas. Diperlukan upaya yang lebih besar untuk mengubah pandangan negatif dan menghilangkan stigma yang sering kali melekat pada mereka, agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan negara yang inklusif. Dengan demikian, PKn yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas dapat menjadi sarana penting dalam membangun kesadaran dan partisipasi mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Langkah-langkah konkret seperti pelatihan bagi pendidik, penyediaan materi ajar yang ramah disabilitas, dan peningkatan kesadaran masyarakat perlu dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

KESIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam membangun *civic resilience* di kalangan penyandang disabilitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun tantangan struktural, seperti keterbatasan aksesibilitas dan stigma sosial, masih menjadi hambatan, terdapat potensi besar untuk menciptakan perubahan yang positif melalui pendidikan yang inklusif dan berbasis nilai-nilai kemanusiaan. PKn yang adaptif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat kesadaran kritis, empati sosial, dan keterampilan advokasi, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan setara dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial. Melalui langkah-langkah ini, kita dapat memperkuat ketahanan sipil penyandang disabilitas, yang pada gilirannya akan memperkaya keberagaman dan kekuatan sosial di Bangka Belitung serta Indonesia secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil Nanggala, Karim Suryadi, C. D. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Civic Philanthropy Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas. *Jurnal: Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Volume 9(Nomor 2), hlm: 101-111.
- Agum Murtaib, Melki Wijaya, Sarifah Aini Hasibuan, Yolanda Citra, & Ilham Hudi. (2024). Menumbuhkan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Era Digital. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 2(3), 215-222. <https://doi.org/10.59581/garuda.v2i3.3941>

- Audica, N. H. (2025). *Peran Investasi Pt. Timah Dalam Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan Dan Pencapaian Sdgs Di Bangka Belitung*. 14(1), 2–7.
- Ginting, S. W., Tjandra, M., & Setiawan, H. (2021). Relevance of Civic Education With The Awareness in Building National Resources as the Embodiment of the National Defense. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(3), 927. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.3.927-936.2021>
- Herawati, H., Yusida, Y., & Diana, D. (2022). Pendidikan Karakter di Bulan Ramadhan selama Pandemi Covid-19 Melalui Pembelajaran Kontekstual. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(4), 3590–3600. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i4.2448>
- Kurniawan, W., & Nurhasanah, D. (2020). Inclusive Education In Bangka Belitung Province Of Indonesia: Challenges And Opportunities. *Journal of Psychology, Religion and Humanity*, 2(1), 61–79.
- Lestari, S. S., Ismail, F., & Astuti, M. (2025). Membangun Karakter Islami Melalui Pembelajaran Inovatif Pai: Implementasi Kontekstual, Research Based Learning, Problem Based Learning, Dan Quantum Theaching. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 4(1), 78–87. <https://doi.org/10.31004/jpion.v4i1.327>
- Mahayani, N. M. H. (2025). Implementasi Kebijakan Sosial Di Masyarakat Marginal: Studi Literatur Tentang Hambatan Dan Strategi Adaptasi. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 11(2), 181–188. <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v11i2.352>
- Mahdiyah, A., Sudirman, C. S., & Widiyani, D. A. (2023). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Bangsa di Era Modern. *Indigenous Knowledge*, 2(3), 254–258.
- Mazid, S., Komalasari, K., Abdulkarim, A., Rahmat, R., Abqa, M. A. R., & Wulansari, A. (2024). Integration of Pancasila Student Profile with Civic Disposition: Building Character for Democratic Citizenship. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 9(4), 522–537. <https://doi.org/10.26618/jed.v9i4.16175>
- Meyrdania, Amelia Dwi Putri, Y. R. (2025). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan partisipasi politik pemuda di kabupaten enrekang. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 10(11).
- Rahadian, R. B. (2023). Analysis of Teacher's Management Policy: A Case Study of South Bangka, Indonesia. *Papernia - Multidisciplinary Scientific Journal for Innovative Research*, 1(1), 26–30. <https://doi.org/10.59178/papernia.202301015>
- Sari, D. I., Rejekiingsih, T., & Muchtarom, M. (2020). *The Concept of Human Literacy as Civics Education Strategy to Reinforce Students' Character in the Era of Disruption*. 397(Iclique 2019), 1132–1141. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200129.140>
- Simarmata, M. J. S., Rizaldy, F. R., Sihombing, L. Y. L., & Amiruddin, M. (2024). Strategi Lobi dan Negosiasi dalam Penyelesaian Konflik Sosial: Studi Kasus Penolakan Pembangunan Gereja HKBP di Cilegon, Indonesia. *Indonesian Culture and Religion Issues*, 1(2), 12. <https://doi.org/10.47134/diksima.v1i2.18>